

**PAJAK PENGHASILAN BADAN YANG DIPENGARUHI
OLEH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees Periode 2013-2017)**

Muhamad Gilang Ardetrian Arief

**Pembimbing:
Dr. Adeh Ratna Komala, SE.,M.Si.**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: gilangardetrian@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Tax Examination and Tax Collection on Revenue from Corporate Income Tax at KPP Pratama Bandung Karees for the period 2013-2017.

In this study using descriptive and verification methods with quantitative approaches. Testing the statistics used are multiple linear regression analysis, correlation analysis, determinant coefficient analysis, hypothesis testing (t test).

The results of this study indicate that there is a significant effect of Tax Examination on the Revenue of Corporate Income Tax and Tax Collection has a significant effect on Corporate Income Tax Receipts. Simultaneous multiple linear analysis results show that Tax Examination and Tax Collection are significantly related to Corporate Income Tax Revenue

Keywords: Tax Examination, Tax Collection and Corporate Income Tax Receipt.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Thomas Sumarsan, 2017:5). Dalam pembangunan negara dibutuhkan biaya yang sangat besar,

pajak merupakan sektor yang sangat potensial dan menjadi pendapatan yang utama bagi negara. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu bersumber dari rakyatnya yang berupa pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8)

Masalah umum yang terjadi di penerimaan pajak yang dikutip dari berita (Yon Arsal, 2017), Pemerintah tampaknya kembali mengalami kekurangan penerimaan pajak (*shortfall*) pada tahun ini pasalnya hingga oktober 2017, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 869,6 triliun atau 67,7 % dari target anggaran pendapatan dan belanja negara penyesuaian (APBNP) 2017 sebesar Rp1.238,6 triliun, realisasi capaian pajak ini memang turun dibandingkan tahun lalu Menurut data Kemenkeu, hingga Oktober 2017, capaian penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas berada di angka Rp459,94 triliun, angka itu kemudian disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp304,97 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp2,94 triliun, PPh migas sebesar Rp41,77 triliun, dan pajak lain senilai Rp8,7 triliun.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan cara meningkatkan efektivitas penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak, penagihan pajak ini dilakukan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya, sehingga dilakukan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Sri Mulyani, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang badan.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang badan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat tentang pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Pemeriksaan Pajak maupun masalah pada Penagihan pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi acuan informasi dalam pengembangan penelitian serta memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta dapat dijadikan sebagai bahan

referensi bagi pembaca asil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang perpajakan, menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama terkait intensifikasi pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam buku Neneng Hayati (2015:334) Pemeriksaan Pajak adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan pajak”.

2.1.1.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:281) menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah “hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar”.

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017: 58) “surat ketetapan pajak kurang bayar adalah “surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar”.

Dari hasil pemikiran diatas, maka indikator untuk Pemeriksaan Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:245) mengatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian

tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2015:38) Surat Tagihan Pajak adalah "suatu surat yang digunakan untuk melakukan Penagihan Pajak atau sanksi administrasi".

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) "tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah "pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak".

Definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2017:70) "pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak". Menurut Nurfransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:4) penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Indikator Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) adalah "naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Pajaknya".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 361) Pemeriksaan Pajak berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak. "Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 297) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. "Pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak bergantung pada ditahap mana Wajib Pajak mau melunasi hutang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka peneliti menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H₂: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:3) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.1.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:13) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Intensifikasi Pajak (X₁), Penagihan Pajak (X₂), Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

3.1.2 Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75-76) unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) operasionalisasi variabel tentunya diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait di dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependent* (terikat) adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sedangkan yang menjadi variabel *independent* (bebas) intensifikasi pajak dan penagihan pajak dengan menggunakan skala rasio.

Menurut Imam Ghazali (2016 : 6) Skala Rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar (*based value*) yang tidak dapat dirubah.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees yang berupa data pemeriksaan pajak dan data jumlah penagihan pajak yang dilakukan serta laporan lainnya.

Menurut V. Wiratna (2015 : 89) menyatakan bahwa sumber data sekunder adalah : "Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan sebagainya".

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah laporan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Jumlah Surat Tagihan Pajak, dan Laporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar selama 5 tahun yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung .

3.4.2 Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling Purposive* sebanyak 60 data dari laporan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Jumlah Pemeriksaan Pajak dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tahun, dan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung, Jawa Barat 40275 Telp. (022) 7333180. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai Juli 2018 sampai dengan Februari 2019. Peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang terletak di Jalan Purnawarman No.21, Bandung, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

3.5 Metode Pengujian dan Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi) dan menggunakan analisis koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi parsial dan pengujian hipotesis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.1 nilai rata-rata pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees periode 2013-2017 adalah

1.270.178.447 Nilai persentase Pemeriksaan Pajak terendah yaitu sebesar 0 yang terjadi pada bulan Mei dan Oktober tahun 2016 dan nilai Pemeriksaan Pajak tertinggi sebesar Rp. 6.601.442.529 terjadi pada bulan Februari tahun 2017.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak

Pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees tahun 2013-2017 adalah sebesar Rp 442.757.625. Nilai persentase Penagihan Pajak terendah yaitu sebesar 0 yang terjadi pada bulan mei, juni dan oktober pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan untuk persentase Penagihan Pajak tertinggi yaitu sebesar Rp 5.301.618.416 yang terjadi pada bulan Maret pada tahun 2014.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pada tabel 4.6 *output* SPSS diatas, dapat dilihat nilai rata-rata Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees tahun 2013-2017 adalah sebesar Rp 7.115.207.536. Nilai persentase Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan terendah yaitu sebesar Rp 3.246.228.240 yang terjadi pada bulan Maret pada tahun 2014. Sedangkan untuk persentase Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tertinggi yaitu sebesar 17.778.851.293 yang terjadi pada bulan April pada tahun 2017.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu Uji Normalitas, uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* atau analisis grafik *normal probability*. Jika probabilitas yang di lihat dari. nilai *Asymp Sig.* > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20 pada tabel 4.4 diperoleh nilai probabilitas yang di lihat dari

nilai *Asymp Sig.* adalah sebesar $0,051 > 0,05$, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20 pada tabel 4.5 diperoleh hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar $1,283 < 10$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

3) Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 4.5 *scatter plot* di atas, dapat dilihat bahwa dalam model tidak terdapat heterokedastisitas karena pada gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau konstan. Sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas sudah terpenuhi untuk persamaan regresi.

4) Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan statistik *Durbin-Watson* (D-W) diperoleh sebesar 1,707. Nilai D-W yang diperoleh dari model dibandingkan terhadap nilai tabel *Durbin-Watson*. Untuk jumlah observasi 60 dan variabel X dalam model regresi sebanyak 2, diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* (D-W) nilai batas bawah D_L sebesar 1,514 dan nilai batas atas D_U sebesar 1,652.

4.1.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 5670757340,179 + 0,664X_1 + 1,359 X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Dari persamaan regresi yang diperoleh konstanta (*intersept*) sebesar 5670757340,179. Pada saat X_1 dan X_2 bernilai nol atau tidak ada perubahan maka rata-rata Pajak Penghasilan Badan tanpa

dipengaruhi faktor apapun adalah sebesar 5670757340,179.

- b. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (X1) bertanda positif sebesar 0,664. Jika Pemeriksaan Pajak meningkat sebesar 1 persen maka Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar Rp. 0,664. Jadi semakin besar Pemeriksaan Pajak akan diikuti dengan meningkatnya Pajak Penghasilan Badan.
- c. Koefisien regresi Penagihan Pajak (X2) bertanda positif sebesar 1,359. Jika Penagihan Pajak meningkat sebesar 1 persen maka Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar Rp. 1,359. Jadi semakin meningkat Penagihan Pajak akan diikuti dengan meningkatnya Pajak Penghasilan Badan.

4.1.3 Analisis Koefisien Korelasi

1) Analisis Korelasi antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0,450 dan masuk dalam kategori “sedang”, yang berarti ada kaitan yang cukup kuat antara Pemeriksaan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan. Hasil perhitungan yang positif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara Pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan Badan, dimana jika Pemeriksaan pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan badan akan naik pula.

2) Analisis Korelasi antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) pada tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa keeratan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0,477 dan masuk dalam kategori “sedang”,

yang berarti ada kaitan yang cukup kuat antara Penagihan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan. Hasil perhitungan yang positif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan, dimana jika penagihan pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan badan akan naik pula.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

- a. Berdasarkan tabel 4.12 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebagai berikut:
 $Y = 0,290 \times 0,450 = 0,130$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yaitu sebesar 13%, sedangkan sisanya sebesar 83% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, ekstensifikasi pajak, dan lain-lain.

- b. Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh determinasi parsial dari variabel penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

$$Y = 0,341 \times 0,477 = 0,163$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 16,3%, sedangkan sisanya sebesar 83,7% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti intensifikasi pajak, penghindaran pajak, wajib pajak efektif, dan lain-lain.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Hipotesis Parsial Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dapat diketahui besaran nilai T-hitung jika dibandingkan dengan nilai t-tabel tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari nilai positif t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($2,300 > t_{tabel} = 2,002$) dengan demikian H_0 ditolak pada tingkat $\alpha = 0,05$. Nilai prob (signifikansi) uji dari T-hitung variabel X1 sebesar 0,025 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ sehingga kesimpulan uji signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Jadi disimpulkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan

2) Pengujian Hipotesis Parsial Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dapat diketahui besaran nilai T-hitung jika dibandingkan dengan nilai t-tabel tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari nilai positif t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($2,701 > t_{tabel} = 2,002$) dengan demikian H_0 ditolak pada tingkat $\alpha = 0,05$. Nilai prob (signifikansi) uji dari T-hitung variabel X1 sebesar 0,009 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ sehingga kesimpulan uji signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Jadi Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Hasil nilai koefisien korelasi untuk Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0.450 artinya terdapat hubungan sedang antara kontribusi pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak bertanda positif sebesar 0,664. Jadi semakin meningkat Pemeriksaan Pajak akan diikuti dengan meningkatnya Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel Pemeriksaan Pajak sebesar $0,025 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian).

Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,300 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,002. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari nilai positif t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($2,300 > t_{tabel} = 2,002$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Neng Siti Rohmatuloh Wahda, 2018 "Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara langsung terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan sebesar 72,8%. Jadi semakin baik pemeriksaan dengan didukung kepatuhan dari wajib pajak maka penerimaan Pajak Penghasilan semakin meningkat".

4.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil nilai koefisien korelasi untuk Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0.477 artinya terdapat hubungan sedang antara kontribusi penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Koefisien regresi Penagihan Pajak bertanda positif sebesar 1,359. Jadi semakin meningkat Penagihan Pajak akan diikuti dengan meningkatnya Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel Penagihan Pajak sebesar $0,009 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,701 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,002. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,701 > 2,002$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Putri Kurniasari, Suharyono dan Agus Iwan Kesuma, (2016) "Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan dari tahun 2012 – 2015 baik dari penerbitan Surat Teguran ataupun Surat Paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari

jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran, dan ini berarti bahwa Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya dan ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2012 – 2015 berada dalam kriteria cukup efektif yaitu diatas 80%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan memiliki kolerasi sedang positif yang berarti ketika Pemeriksaan Pajak meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
2. Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan memiliki kolerasi sedang positif yang berarti ketika Penagihan Pajak meningkat akan diikuti dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Berdasarkan kesimpulan diatas, yang menunjukkan bahwa turunnya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terjadi karena Intensifikasi Pajak dan Penagihan Pajak maka disarankan sebagai berikut :

1. Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi diupayakan untuk ditingkatkan melalui pemeriksaan dan aturan bagi yang melanggar pembayaran pajak, agar penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui intensifikasi pajak meningkat.
2. Surat Tagihan Pajak (STP) diupayakan untuk ditingkatkan melalui sosialisasi, aturan dan sanksi yang tegas bagi penghindar pajak, agar penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui penagihan pajak meningkat.

5.2.2 Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi, sampel dan indikator yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chairil, Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haula rosdiana dan Edi Slamet irianto. 2011. *Panduan lengkap tata cara perpajakan di indonesia*. Jakarta. Visi Media.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. Edisi Revisi : *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Ed.XVIII*. Yogyakarta: Andi.
- Neneng Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setya.
- Neng Siti Rohmatul Wahda. 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi).
- Nicola Putra dan Rosalita. 2016. *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 sampai 2014)*.
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur : Mudah dan Cepat*

penggunaan Faktur Pajak Secara Online. Jakarta : Visimedia Pustaka.

Putri Kurniasari.2016. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan*.

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. 2015. *Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Pepajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sri Mulyani Indrawati. 2017. Menteri Keuangan. Diakses melalui <https://tirto.id/delapan-strategi-menkeu-tingkatkan-penerimaan-pajak-csXZ>

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak (X1)	60	0	6601442529	1270178447	1513628675.93087
Valid N (listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penagihan Pajak (X2)	60	0	4041591719	442576625	868443050.989 67
Valid N (listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	60	3246228240	17778851293	7115207536	3463073926.36472
Valid N (listwise)	60				

Tabel 4.2

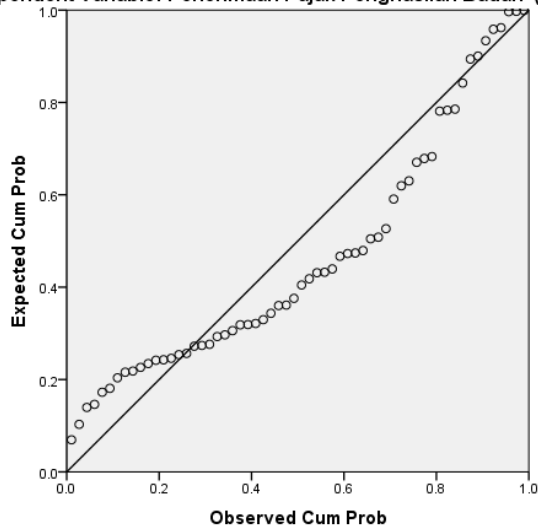
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6E-7
	Std. Deviation	2911591823.73 720600
	Absolute	.175
Most Extreme Differences	Positive	.175
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		1.355
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

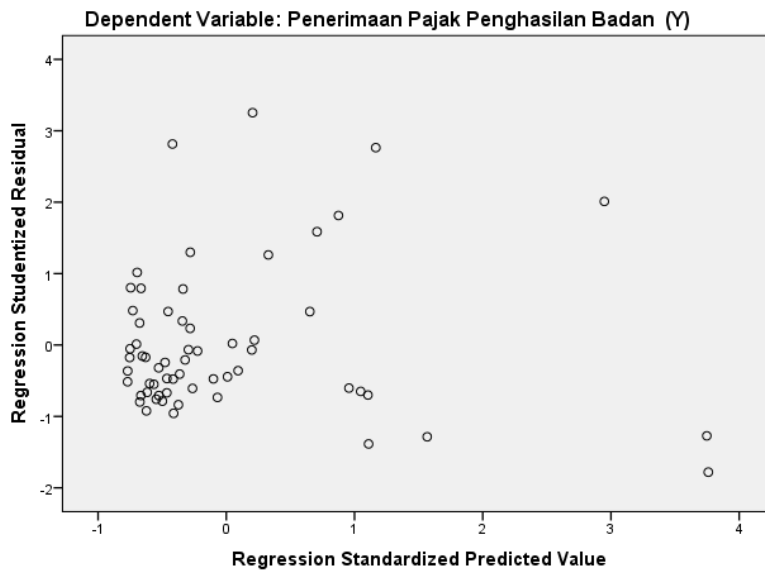


Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	Pemeriksaan Pajak (X1)	.779 1.283
	Penagihan Pajak (X2)	.779 1.283

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Scatterplot



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 ^a	.293	.268	2962231999.67776	1.707

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5670757340.179	503506217.849		11.263	.000
1 Pemeriksaan Pajak (X1)	.664	.289	.290	2.300	.025
Penagihan Pajak (X2)	1.359	.503	.341	2.701	.009

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Correlations^b

		Pemeriksaan Pajak (X1)	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pearson Correlation	1	.450**
	Sig. (2-tailed)		.000
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)	Pearson Correlation	.450**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Listwise N=60

Correlations^b

		Penagihan Pajak (X2)	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)
Penagihan Pajak (X2)	Pearson Correlation	1	.477**
	Sig. (2-tailed)		.000
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)	Pearson Correlation	.477**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Listwise N=60

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541 ^a	.293	.268	2962231999.67776

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 ^a	.293	.268	2962231999.67776	1.707

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	Correlations		
	Beta	Zero-order	Partial	Part
Pemeriksaan Pajak (X1)	.290	.450	.291	.256
Penagihan Pajak (X2)	.341	.477	.337	.301

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	5670757340.179	503506217.849	11.263	.000
1 Pemeriksaan Pajak (X1)	.664	.289	2.300	.025
Penagihan Pajak (X2)	1.359	.503	2.701	.009

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Variabel	t _{statistik}	Prob (sig)	H ₀	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	2,300	0,025	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Variabel	t _{statistik}	Prob (sig)	H ₀	Keterangan
Penagihan Pajak (X2)	2,701	0,009	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 0,05$